

PENGADILAN AGAMA BONTANG



SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN AGAMA BONTANG
KLAS II
Jl. AWANG LONG NO 69 TL. 0548-73501

BAGIAN ANGGARAN 005.01

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN

WILAYAH KALIMANTAN TIMUR (1600) PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA BONTANG (652080)

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 2 TA 2022

Untuk Periode yang Berakhir 30 Desember 2022



Jalan Awang long No. 60
Telp. (0548) 23001 Kota Bontang
Kalimantan Timur
Website: www.pa-bontang.go.id
Email: pa-bontang@pta-samarinda.net



L APORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Untuk Periode yang Berakhir 30 Desember 2022

005.01.1600.652080

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Awang long No 69 Rt. 07

Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

Kalimantan Timur 75311

☐ 0548-23001

· pa-BONTANG@pta-samarinda.net

🌐 www.pa-BONTANG.go.id

A. Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

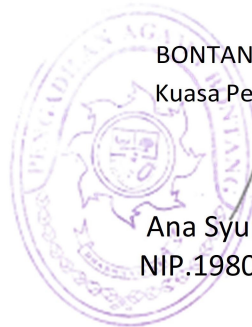
Pengadilan Agama Bontang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Bontang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BONTANG, 3 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ana Syuryaningrum, S.H.I

NIP.198005302006042013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	1
II. Neraca	3
III. Laporan Operasional.....	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	5
A. Penjelasan Umu.....	5
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	11
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	12
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	19
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	20
VI. Lampiran dan Daftar	21



PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jl. Awang long No 69 Rt. 07
Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang □ 0548-
23001 ✉ pa-BONTANG@pta-samarinda.net 🌐 www.pa-BONTANG.go.id
Kalimantan Timur 75311

A.1 Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester Satu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BONTANG, 3 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ana Syuryaningrum, S.H.I

NIP.198005302006042013

RINGKASAN

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kalimantan Timur (1600) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Semester IITA 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Juni sampai dengan 30 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester IITA 2022 adalah berupa Pendapatandan Hibah sebesar Rp,00 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp,00.

Realisasi Belanja Negara yaitu Belanja Transaksi pada Semester IITA 2022 adalah sebesar Rp 1.485.522.360,00 atau mencapai 45.66 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.253.691.000,00, yang terdiri dari Rupiah Murni Rp. 1.485.522.360,00 atau mencapai 45.66 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.253.691.000,00, dengan rincian yaitu Realisasi Belanja Pegawai Rp. 987.795.440 atau mencapai 49.87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.1980.702.000, Realisasi Belanja Barang Rp.487.726.920 atau mencapai 40.21 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.212.989.000 Realisasi Belanja Modal Rp.10.000.000 atau mencapai 16.67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Desember 2022. Untuk Asset pada Nilai Aset Lancar per 30 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 51.526.318. Nilai Aset Tetap Rp.7.39.468.149 dan jumlah Aset RP. 7.446.994.467 , adapun untuk Kewajiban sejumlah Rp. 7.446.994.467 yang Terdiri dari kewajiban jangka Pendek yaitu Utang kepada pihak Ketiga I Rp.308.843.526, Utang yang Belum ditagihkan Rp.40.920.063, Uang Muka dari KPPN Rp.50.000.000 dan utang jangka Pendek Lainnya 669.318 dan pada Ekuitas Rp 7.046.561.00 Kewajuban dan Ekuitas sebesar Rp 7.446.994.467,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan Negara Bukan pajak lainnya sebesar Rp0.00, Pendapatan Operasional (A) yakni Beban Operasional Rp.1.266.890.177.00, Jumlah Beban operasional (B) 1.994.953.256.00 surplus/defisit dari Kegiatan operasional (C=A-B) Rp.(1994.953.256.00), surplus/defisit dari kegiatan non operasional, Rp.00 surplus/defisit sebelum pos luar biasa(E=C+D), Rp. (1994.953.256.00), Surplus/Defisid-LO (E+F) adalah Rp(1994.953.256.00), .

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tahun 2022 adalah sebesar Rp7.555.992.496.00 dan di tahun 2021 adalah Rp.0 Suplus/Difisit LO tahun 2022 sebesar Rp (1.994.953.296,00) dan di tahun 2021 adalah Rp.0 dan Transaksi Antar Entitas di tahun 2022 sebesar Rp 1.485.522.320,00 Kenaikan/Penurunan Ekuitas (509.430.976) di tahun 2021 Rp.0 sehingga Ekuitas akhir di tahun 2022 adalah senilai Rp.7.046.561.600,00. Dan di tahun 2021 adalah Rp0

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Semester IITA 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 disusun dan basis akrual.

Untuk Asset satker 652080 di bulan Juni telah melakukan pelaporan melalui aplikasi menu Operator dan menu Aprofer namun belum dilakukan validator dikarenakan penggantian user Paswod Validator

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR (1600)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE SEMESTER I TAHUN 2022 DAN SEMESTER II 2021

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN DALAM NEGERI	50.295.000	34.619.000	(15.676.000)	68,83	0	0	0	0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	50.295.000	34.619.000	(15.676.000)	68,83	20.000.000	29.562.000	9.562.000	148
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	50.295.000	34.619.000	(15.676.000)	68,83	20.000.000	29.562.000	9.562.000	148
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	62.000.000	32.500.000	(29.500.00)	52.42	47.000.000	21.200.000	(25,800,000)	45
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBANUTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	62.000.000	32.500.000	(29.500.00)	52.42	47.000.000	21.200.000	(25,800,000)	45
C	PEMBIAYAAN				0				0

II. NERACA

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR (1600)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

NERACA

PER 30 Desember 2022 DAN 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		30-JUN-2022	30 JUNI 2021	JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	EKUITAS AWAL	0	0	0	-
2	SURPLUS / DEFISIT – LO	(1,881,000)	0	(1,881,000)	-
3	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN	0	0	0	-
3.a	Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
3.b	Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	-
3.c	Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	-
3.d	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	-
3.e	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	-
3.f	Koreksi Lain-lain	0	0	0	-
4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(2,119,000)	0	(2,119,000)	-
5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(4,000,000)	0	(4,000,000)	-
6	EKUITAS AKHIR	(4,000,000)	0	(4,000,000)	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR (1600) PENGADILAN TINGGI AGAMA
SAMARINDA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Desember 2022

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0
Pendapatan Cukai	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0
Pendapatan Bea Masuk	0
Pendapatan Bea Keluar	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	34,619,000
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	34,619,000
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	0
Jumlah Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL (A)	34,619,000
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	0
Beban Persediaan	900,000
Beban Barang dan Jasa	26,000,000
Beban Pemeliharaan	0
Beban Perjalanan Dinas	9,600,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
Beban Bunga	0
Beban Subsidi	0
Beban Hibah	0
Beban Bantuan Sosial	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0
Beban Transfer	0
Beban Lain-Lain	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL (B)	36,500,000
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (C= A-B)	(1,881,000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH KALIMANTAN TIMUR (1600)
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Desember 2022 DAN JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		30-JUN-2022	30 JUNI 2021	JUMLAH	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1	EKUITAS AWAL	0	0	0	-
2	SURPLUS / DEFISIT - LO	(1,881,000)	0	(1,881,000)	-
3	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN	0	0	0	-
3.a	Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
3.b	Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	-
3.c	Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	-
3.d	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	-
3.e	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	0	0	-
3.f	Koreksi Lain-lain	0	0	0	-
4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(2,119,000)	0	(2,119,000)	-
5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(4,000,000)	0	(4,000,000)	-
6	EKUITAS AKHIR	(4,000,000)	0	(4,000,000)	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Kalimantan Timur (1600) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama BONTANG

Pengadilan Agama Bontang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Awang Long No 69 kec Bontang Utara.

Pengadilan Agama Bontang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama Bontang berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas”**. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan Semester IITA 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bontang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Melalui Aplikasi SAKTI yang dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap,

persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bontang. menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bontang. dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bontang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bontang. adalah sebagai berikut:

A.5.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA · Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.2. *Pendapatan-LO*

- Pendapatan-LO
- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
 - Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.3. *Belanja*

- Belanja
- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
 - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
 - Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.4. *Beban*

- Beban
- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.5. *Aset*

- Aset
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar (1) *Aset Lancar*

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap (2) *Aset Tetap*

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

(3) *Penyusutan Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Tanah
 - 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

(4) *Piutang Jangka Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

(5) *Aset Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua

belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.5.6. Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) **Kewajiban Jangka Pendek**
 - Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) **Kewajiban Jangka Panjang**
 - Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.5.7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bontang telah melaksanakan belanja sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp32.500.000,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp,32.500.000 atau mencapai 52.42 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 62.000.000. Rincian pendapatan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bontang dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan PNBPNP	50.295.000	34.619.000	68,83
BELANJA BARANG	62.000.000	32.500.000	52,42

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara
Rp32.500.000,00

Realisasi Belanja instansi pada Semester IITA 2022 adalah sebesar Rp 32.500.000 atau 52.42% dari anggaran belanja sebesar Rp 62.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester IITA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester IITA 2022

Uraian	30 Desember 2022		
	ANGGARAN AWAL	REALISASI	% Real Angg
BELANJA PEGAWAI	0	0	0
BELANJA BARANG	62.000.000	32.500.000	52,42
BELANJA MODAL	0	0	0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0
BELANJA SUBSIDI	0	0	0
BELANJA HIBAH	0	0	0

BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0
------------------------	---	---	---

BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0
JUMLAH BELANJA (B I + B II)	62.000.000	32.500.000	52.42

Realisasi Belanja Semester IITA 2022 adalah sebesar 52.42%

B.3. Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp32.500.000,00*

Realisasi Belanja Barang Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 32.500.000,00 dan Rp 21.200.000,00. Realisasi Belanja Barang Semester IITA 2022 mengalami kenaikan sebesar 10,30% dari Realisasi Belanja Barang Semester IITA 2021. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya karena adanya beberapa Akun belanja jasa operasional dan belanja jasa sepanjang Semester IITA 2022.

Belanja Barang Semester IITA 2022

URAIAN	30 Desember 2022
Beban Persediaan	900,000
Beban Barang dan Jasa	26,000,000
Beban Perjalanan Dinas	9,600,000
Jumlah Belanja	32.500.000

- Telah Adanya Akun Belanja barang persediaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat Prodeo,
- Belanja jasa, Pengiriman surat dinas pos Kegiatan Pelayanan Masyarakat Prodeo,
- Telah adanya akun Belanja Perjudin dalam kota diperuntukkan Kegiatan Pemangginlan Para Pihak berperkara Prodeo

B.4. Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester IITA 2022 belum terlaksana demikian juga di Semester IITA 2021.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum

disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
30 Desember 2022 dan 30
Desember 2021

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
30 Desember 2022 dan 30
Desember 2021

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

C.3.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00

Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
30 Desember 2022 dan 30
Desember 2021

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

C.4.

Piutang PNBPNP Rp0,00

Piutang PNBPNP

Saldo Piutang PNBPNP per tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang PNBPNP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang

Rincian Piutang PNBP
30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021

Uraian	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Piutang PNBP	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

- C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,00 Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR
30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021

No	Nama	30 Juni 2021	31 Desember 2020
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

- C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**
Bagian Lancar TPA Rp0,00 Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA
30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021

No	Nama	30 Juni 2021	31 Desember 2020
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

- C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar**
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0,00 Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

- C.8. Belanja Dibayar di Muka**
Belanja Dibayar di Muka Rp0,00 Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat

dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

**Rincian Belanja Dibayar di Muka
30 Desember 2022 dan 30
Desember 2021**

Jenis	30 Juni 2021	31 Desember 2020
Pembayaran Domain dan Hosting	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,00 Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10. Persediaan

Persediaan Rp0 Nilai Persediaan per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Desember 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021

Jenis	30 Desember 2022	30 Desember 2021
Barang Konsumsi persediaan	0	0
Jumlah Belanja	0	0

Sampai dengan periode yang berakhir per 30 Desember 2022, seluruh pencatatan bahan/barang persediaan dikelompokkan ke dalam barang konsumsi dan barang persediaan untuk pemeliharaan dan berdasarkan hasil opname fisik dinyatakan bahwa semua barang persediaan dalam kondisi baik.

C.11. Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan yang Belum Diregister - Rp0,00 Saldo Persediaan yang Belum Diregister per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Persediaan yang Belum Diregister bernilai minus muncul akibat beberapa satuan kerja belum melakukan penyelesaian melalui transaksi GUP atas pembelian barang-barang persediaan.

C.12. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR Rp0,00 Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat

kelalaiannya atau tindakan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan tuntutan ganti rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan

bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

- C.13. Tagihan Penjualan Angsuran**
Tagihan Penjualan Angsuran Rp0,00 Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.
- C.14. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0,00 Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.
- C.15. Tanah**
Tanah Rp000 Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satuan Kerja Pengadilan Agama Bontang per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah sebesar Rp052.000,00 dan Rp 0.00.
- C.16. Peralatan dan Mesin**
Peralatan dan Mesin Rp 0,00 Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.
- C.17. Gedung dan Bangunan**
Gedung dan Bangunan Rp0,00 Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalahRp0,00 dan Rp0,00.
- C.18. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp000 Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 00,00 dan Rp 00,00. Atas aset jalan, irigasi dan jaringan ini dengan mengacu pada hasil kesepakatan dan kebijakan dari Mahkamah Agung RI bahwa untuk setiap aset berupa jalan, jembatan, jaringan dan irigasi untuk yang instalasinya melekat pada gedung agar diakui sebagai aset gedung dan bangunan mengingat aset jalan, jembatan, jaringan dan irigasi bukan merupakan aset yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan,.
- C.19. Aset Tetap Lainnya**
Aset Tetap Lainnya Rp0,00 Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

C.20

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0,00

Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Desember 2022 dan 31 Juni 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.00

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	
Belanja Lain-lain yang Masih Harus Dibayar	0	
Total	0	

C.20. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.21. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp 0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah masing-masing Rp 0 dan Rp 0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.22. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp 0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Desember 2022 dan 30 Juni 2021 adalah Rp 0 dan Rp0 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

C.23. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp0,00

Saldo Aset Lain-lain per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

C.24. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp 0

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Desember 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.25. Uang Muka dari KPPN

C.26. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp0,00 Pendapatan Yang Ditangguhkan per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.27. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka Rp0,00 Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp17.401.042,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.28. Ekuitas

Ekuitas Rp(4.000.000,00) Ekuitas per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(4.000.000,00) dan Rp.0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP
Rp 34,619,000,00 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 34,619,000,00 dan Rp 29,562.000.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp.0 Jumlah Beban Pegawai pada Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.00 dan Rp.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp 0 Jumlah Beban Persediaan pada Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah sebagai berikut:

D.4. Beban Pemeliharaan

D.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan

D.6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp,00 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0
Beban Keperluan Mendesak/Tak Terduga	0	0	0
Beban Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	0	0	0
Jumlah	0	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp536.329.404.990,00 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp536.329.404.990,00 dan Rp534.492.157.492,00.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit-LO
Rp74.144.489.256,00 Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah sebesar Rp74.144.489.256,00 dan Rp61.355.160.566,00. Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.2.1. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp0,00 Nilai Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.2.2. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.2.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah/(kurang) atas nilai persediaan untuk

Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,00.

E.2.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 30 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya	0
Jumlah	0

E.2.5. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0,00

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp(7.493.750,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.2.6. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp7.206.000,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	0
Ekuitas Transaksi Lainnya	0
Jumlah	0

E.3. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas

Rp,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Semester IITA 2022 dan Semester IITA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Belanja	30 Desember 2022		30 JUNI 2021		NAIK TURUN %
	kredit	Debit	kredit	Debit	
Ditagihkan ke Entitas lainnya	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0	0	0

E.3.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Rp0

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode Semester IITA 2022, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0.

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Transaksi Antar Entitas	30 Desember 2022		30 JUNI 2021	
	kredit	Debit	kredit	Debit
Ditagihkan ke Entitas lainnya	0	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0	0

E.3.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar Rp0,00

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 Rp0,00 sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Keluar/Transfer Masuk Per Satker

No	Kode	Uraian	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk
		NIHIL				
		JUMLAH	0		JUMLAH	0

E.3.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

*Pengesahan Hibah
Langsung dan
Pengembalian
Pengesahan Hibah
Langsung Rp,00*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp.00 dari total Rp,00 yang diterima sepanjang 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Juni 2021 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp(4.000.000)*

Nilai Ekuitas pada 30 Desember 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(4.000.000,00) dan Rp0.